

Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa 2019-2021

The Impact of the Indonesian Government's Nickel Hilirization towards the European Union 2019-2021

Anambowo Ndruru^a, Ibnu Zulian^b

^aMahasiswa Universitas Potensi Utama, Jl. Tanjung Mulia, Medan, 20255, Indonesia

^b Dosen Universitas Potensi Utama, Gg.Madio, Jl. Gando. Tanjung mulia, Medan Deli, Medan. 20241, Indonesia
anambowo08@gmail.com ¹, ibnuzulian45@gmail.com ²

ABSTRAK

Industri merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang ada pada masa sekarang. Adanya industri menjadi salah satu hal yang menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah. Salah satu wilayah yang sangat bergantung kehidupan di berbagai macam bidang industri, namun kehidupan di industri Uni Eropa tidak selalu berjalan lancar dan terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat mendisrupsi segala tindakan yang dilakukan di ranah industri tersebut. Seperti salah satunya adalah permasalahan kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menghentikan sementara penjualan nikel ke Uni Eropa dan kembali menjualnya dalam bentuk nikel yang setengah jadi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki manfaat yang sangat besar bagi negaranya, namun merupakan sebuah kerugian yang sangat besar bagi Uni Eropa, karena harus membayar nikel dengan harga yang lebih mahal dan menunggu nikel kembali dijual oleh Indonesia, mengingat nikel merupakan salah satu bahan pokok yang sangat esensial dalam menghasilkan berbagai macam barang elektronik di Eropa. Penelitian ini akan mendiskusikan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan hilirisasi nikel Indonesia terhadap industri yang ada di Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik.

Kata Kunci : Uni Eropa, Indonesia, Nikel, Industri, Kebijakan

ABSTRACT

Industry is an inseparable part of life today. The existence of an industry is one of the things that guarantees the sustainability of the economic life of a country or a region. One of the areas that depend heavily on various industrial fields, life in the European Union industry does not always run smoothly and there are various kinds of problems that can disrupt all actions taken in the industrial sector. One of them is the issue of downstream policies carried out by the Indonesian government. The downstream policy carried out by the Indonesian government is to temporarily stop nickel sales to the European Union and resell it in the form of semi-finished nickel. The policy carried out by the Indonesian government has enormous benefits for the country, but is a very big loss for the European Union, because it has to pay for nickel at a higher price and wait for nickel to be sold again by Indonesia, considering that nickel is one of the main raw materials that Indonesia needs. essential in producing a wide variety of electronic goods in Europe. This study will discuss how the impact of Indonesia's nickel downstream policy on industries in the European Union. This research uses descriptive-analytic method.

Keywords : European Union, Indonesia, Nickel, Industry, Policy

Info Artikel :

Disubmit: 3 Maret 2023

Direview: 12 April 2023

Diterima: 21 Mei 2023

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Hubungan antar bangsa merupakan salah satu hal yang memiliki berbagai macam isu yang dinamis yang mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan tempat dan waktu dari suatu isu yang sedang terjadi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari luasnya cakupan isu yang dimiliki oleh Hubungan

Internasional sebagai ilmu pengetahuan seperti isu ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya yang krusial bagi masing-masing kehidupan negara-negara yang ada di dunia.

Salah satu isu yang pada masa ini cukup hangat dibicarakan adalah isu perubahan kebijakan nikel oleh pemerintah Indonesia. Adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019 dan memasuki tahun 2020 merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan Indonesia dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, mengingat Indonesia merupakan salah satu dari produsen nikel yang paling besar di dunia (S. W. Rahayu & Sugianto, 2020). Nikel sendiri merupakan bahan mentah yang diperlukan di berbagai industri elektronik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada masa sekarang, mengingat hampir semua peralatan yang digunakan pada masa sekarang memerlukan listrik.

Kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas nikel yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, mengingat selama ini penjualan nikel yang dilakukan oleh Indonesia hanya menjual nikel yang mentah, yang menurunkan kualitas yang dimiliki oleh Indonesia di dunia internasional. Selain daripada itu, dengan menjual nikel yang setengah jadi melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, Indonesia akan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk mengolah nikel yang mentah menjadi nikel yang setengah jadi setelah sebelumnya nikel hanya dijual dalam bentuk yang mentah dan harga yang sangat murah.

Kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sumber daya tambang yang ada di Indonesia, terutama pada era digital, yang mana produksi dan permintaan akan nikel semakin meningkat, pemerintah Indonesia ingin memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan dan memperbaiki keadaan yang ada di dalam negaranya. Adapun kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bertepatan dengan momentum penggunaan dan permintaan nikel yang semakin banyak terutama dari seluruh negara dan wilayah yang membeli nikel yang diproduksi oleh Indonesia selama ini.

Uni Eropa merupakan sebuah kawasan yang terdiri atas berbagai negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Denmark dan lain sebagainya (Immanuel & Wahyudi, 2016). Uni Eropa juga memiliki salah satu industri yang paling padat dan terbaik di dunia dengan menghasilkan berbagai macam produk dan teknologi elektronik yang sangat diperlukan pada masa kini untuk menunjang berbagai macam situasi kehidupan yang dialami oleh setiap individu yang tidak hanya terbatas di wilayah yang dimiliki oleh Uni Eropa saja, melainkan wilayah yang berasal dari seluruh dunia, mengingat industri yang berada di kawasan Uni Eropa mengekspor berbagai macam produk dan jasanya seperti alat transportasi, gawai dan sebagainya yang merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan pada kehidupan kontemporer.

Untuk menghasilkan dan membuat semua barang dan jasa yang diperlukan dalam pasar, Uni Eropa memerlukan berbagai macam bahan baku yang tidak hanya didapatkan dari wilayah yang dimiliki oleh Uni Eropa, melainkan dari berbagai macam wilayah yang ada di dunia. Salah satu barang mentah yang diperlukan dalam industri yang ada di Uni Eropa adalah nikel, yang berguna untuk membuat dan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk mendapatkan nikel, Uni Eropa tidak hanya bergantung kepada wilayah yang dikuasanya saja, melainkan membelinya dari salah satunya adalah Indonesia.

Kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan hilirisasi nikel merupakan salah satu kerugian yang sangat signifikan bagi perindustrian yang berada di Uni Eropa, mengingat kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia mewajibkan penjualan nikel yang dilakukan oleh Indonesia untuk sementara waktu diberhentikan sampai di saat Indonesia dapat memproduksi nikel setengah jadi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya (Izzaty & Suhartono, 2019). Hal itu berguna untuk memberikan Indonesia waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas nikel yang ada seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Di lain sisi, perindustrian Uni Eropa tidak dapat menunggu sampai penjualan diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia, mengingat permintaan yang ada di pasar terus berjalan dan tidak dapat dikendalikan atau diberhentikan sebab kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut. Pada akhirnya, perindustrian Uni Eropa mengalami kerugian yang signifikan akibat kekurangan bahan baku untuk memproduksi berbagai macam barang dan jasa yang terkait. Terdapat berbagai macam jenis industri yang terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan produksi dari berbagai macam barang yang memerlukan nikel di Uni Eropa, akibat dari pemberlakuan kebijakan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini akan membahas dan mendiskusikan bagaimana dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perindustrian yang berada di Eropa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah dibawakan, maka peneliti memutuskan untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak dari pelarangan ekspor nikel terhadap Uni Eropa?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai salah satu usaha untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dituliskan dan dideskripsikan dalam bagian sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa konsep. Adapun konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

A. KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan nasional diibaratkan seperti nyawa yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan adanya kepentingan nasional, negara-negara dapat mengetahui secara pasti akan tindakan yang akan diambil berdasarkan prinsip dan pengalaman yang telah didapatkan yang kemudian disusun berdasarkan keadaan dalam negeri suatu negara (Morgenthau & Thomas, 1990). Adanya kepentingan nasional juga akan memperbolehkan tiap negara untuk bertindak lebih hati-hati dan semua tindakan yang dilakukan oleh negara ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional yang dimilikinya.

Kepentingan nasional menurut KJ Holsti merupakan salah satu unsur dari kehidupan suatu negara yang memiliki empat dimensi: Keamanan, otonomi, kesejahteraan, dan prestise. Semua unsur ini merupakan unsur yang memenuhi kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Yang dimaksud dengan unsur keamanan adalah bahwa negara adalah entitas yang bertanggungjawab akan keamanan yang ada di dalam negaranya (Holsti, 1983). Keamanan yang dimaksud adalah kehidupan dari para warganya yang harus terbebas dari marabahaya dan berbagai macam ancaman yang tidak hanya mengancam para penduduknya, melainkan integrasi dan kedaulatan suatu negara. Konteks keamanan dalam konsep ini tidak hanya terbatas pada keamanan yang berpusat kepada negara sebagai entitas yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di daerahnya, melainkan kepada para warganya juga yang harus terbebas dari kemiskinan dan juga kelaparan.

Yang dimaksud dengan otonomi adalah negara harus bersifat independen dalam menentukan kepentingan nasionalnya sendiri, tanpa campur tangan dari pihak lain atau pengaruh yang dimiliki oleh pihak lain. Negara harus mandiri dan memiliki keunikan sendiri dalam menentukan kepentingan nasional yang akan digapainya di masa depan, mengingat kepentingan nasional disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dimiliki oleh suatu negara.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah negara harus mampu membawakan kemakmuran kepada setiap warga negaranya melalui kepentingan nasional yang telah dirancang sebelumnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan prestise adalah bahwa kepentingan nasional yang disusun oleh suatu negara harus memiliki nilai unggul dan keunikan tertentu dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan nasional yang melandaskan semua tindakannya dalam sebuah sistem internasional.

B. KEUNTUNGAN RELATIF

Keuntungan relatif merupakan salah satu konsep yang menekankan kepada nilai keuntungan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing aktor dan pihak dalam suatu situasi. Hal ini dapat dicontohkan pada permasalahan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mana hilirisasi merupakan kebijakan yang memiliki niat yang baik. Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan hilirisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kondisi dan daya ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Di lain sisi, bagi Uni Eropa, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyebabkan berbagai macam kerugian bagi wilayahnya, mengingat pembelian nikel tidak dapat dilakukan selama proses hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Konsep keuntungan relatif merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 yang mana pada masa itu Ricardo membuat sebuah perbandingan antara Inggris dan juga Portugal yang melakukan spesialisasi di berbagai macam bidang, yang mana spesialisasi yang dilakukan oleh kedua negara berhasil mengantarkan kedua negara ke perkembangan ekonomi yang sangat signifikan terhadap negaranya. Konsep keuntungan relatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo memiliki beberapa asumsi seperti pasar yang berada di kedua entitas atau negara bersifat bebas dan masing-masing perusahaan yang berada di masing-masing negara berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat (Jackson, Robert & Sorensen, George, 2013).

Dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan relatif merupakan sebuah konsep yang memperbandingkan keuntungan yang didapatkan oleh dua entitas politik yang berbeda dalam sebuah pasar internasional dan bahwa keuntungan yang didapatkan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh berbagai macam aktor tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitik dalam menjelaskan data yang ada. Peneliti juga akan menggunakan metode Library Research untuk mengumpulkan data yang ada dari berbagai sumber yang valid dan sudah terbit sesuai dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti.

(1)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan dengan menggunakan analisis yang didapatkan dari konsep yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL PEMERINTAH INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam. Potensi Indonesia yang ada tersebut dimanfaatkan oleh pemerintahan dari negara tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sebagai negara (Investasi, 2019). Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia menjual dan mengekspor berbagai macam sumber daya alam yang dimilikinya ke berbagai negara yang ada di dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling dibutuhkan oleh berbagai negara industri, karena menghasilkan dan menjual berbagai macam barang pokok dan barang mentah yang dibutuhkan oleh perindustrian kontemporer.



Gambar.1 Presiden Indonesia

Terlepas dari posisi dan keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia hanya menjual barang mentah dan terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya dan memperburuk keadaan lingkungan yang ada di negaranya. Oleh karena itu, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia dan membuat pengaruh yang dimiliki oleh Indonesia semakin meluas, Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk melakukan kebijakan hilirisasi, yang dapat dinilai sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperjualkan di pasar internasional, yang semulanya Indonesia menjual nikel mentah ke berbagai negara industri yang ada di dunia, maka dengan adanya hilirisasi, Indonesia akan menjual nikel yang setengah jadi, yang mana kualitas nikel yang akan dijual oleh Indonesia juga akan membuka berbagai macam kesempatan dan lapangan tenaga kerja bagi orang Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan agar dapat mengolah sumber daya nikel yang dimiliki oleh Indonesia.

Kebijakan hilirisasi nikel tersebut mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada 1 Januari 2020 berdasarkan peraturan Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 (Putra, 2021). Kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa stok atau persediaan nikel yang ada di Indonesia hanya sekitar 700 juta ton. Berdasarkan penelitian dan perkiraan yang telah dilakukan dan dikalkulasikan sebelumnya yang dibuat berdasarkan stok nikel yang ada di Indonesia, diperkirakan bahwa jika pertambangan dilakukan secara terus-menerus, maka stok nikel di Indonesia akan habis dalam waktu 8 tahun. Kebijakan hilirisasi selain untuk meningkatkan kualitas nikel yang dimiliki oleh Indonesia, juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghemat dan mencari cadangan baru dari nikel yang ada di wilayah yang dikuasai oleh Indonesia (Indonesia, 2018). Dengan itu, pemerintah Indonesia dapat menemukan sebuah cara untuk menghidupkan perindustrian yang ada di Indonesia tanpa harus meninggalkan pasar internasional yang ada.

a) MANFAAT HILIRISASI BAGI INDONESIA KEBIJAKAN

Indonesia sebagai negara yang melakukan kebijakan hilirisasi menuai berbagai macam manfaat yang sangat menguntungkan bagi negaranya. Adapun manfaat tersebut bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Nikel

Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar nikel yang ada di dunia, yang menguasai sekitar 52% persediaan nikel yang ada di dunia, memberikan Indonesia kendali yang sangat luasa atas penjualan

nikel yang ada di dunia internasional. Indonesia juga dapat dengan mudah mengendalikan harga nikel yang tersebar di seluruh dunia berdasarkan posisi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut (Samvero, 2022).

Cadangan nikel terbanyak yang dimiliki oleh Indonesia berada di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di daerah Sulawesi, yang memiliki cadangan sekitar 4.5 Miliar ton nikel. Selain daripada itu, Indonesia telah memiliki berbagai macam smelter, yang merupakan alat yang digunakan untuk mengolah sumber daya nikel yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia diibaratkan telah menjadi super-power dari nikel yang ada di seluruh dunia (K. F. Dkk, 2017).

Terlepas dari keuntungan dan posisi serta potensi yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia masih memiliki berbagai macam kekurangan. Salah satu kekurangan yang sangat signifikan yang dimiliki oleh Indonesia adalah penjualan nikel Indonesia yang masih dalam bentuk mentah. Nikel mentah yang dijual oleh Indonesia tersebut merupakan nikel dalam bentuk termurah. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia di wilayahnya sendiri, Indonesia dapat menambah pemasukan serta penghasilan di dunia internasional apabila dapat berhasil meningkatkan mutu atau kualitas yang didapatkannya.

Adanya itu tentu memerlukan sebuah program atau kebijakan yang dinamakan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat secara signifikan menaikkan dan meningkatkan kualitas dari penjualan nikel yang dilakukan oleh Indonesia selama ini. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara yang hanya menjual sumber daya alam yang mentah saja yang kemudian dipergunakan oleh negara yang berindustri lebih maju, melainkan dapat bersaing dengan negara-negara yang menghasilkan berbagai macam produk tersebut.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain daripada memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, karena dengan adanya kebijakan hilirisasi, pemerintah Indonesia secara tidak langsung belajar caranya untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara lain (Samvero, 2022).

Keinginan Indonesia untuk lebih mandiri harus diikuti dengan penggunaan dan pemberdayaan berbagai macam sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk yang mencapai angka sekitar 270 juta penduduk. Potensi dan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar dan sangat berdampak terhadap masa depan Indonesia. Hal ini merupakan sebuah kabar baik bagi Indonesia sebagai negara yang ingin maju dan mendapatkan berbagai macam keuntungan di masa depan.

Peningkatan sumber daya manusia dengan hilirisasi nikel adalah proses pengolahan nikel yang semulanya merupakan nikel mentah menjadi nikel setengah jadi kemudian dijual ke berbagai negara di dunia, tentu memerlukan berbagai tenaga kerja, yang mana seperti diketahui pembukaan lapangan kerja besar-besaran akan menaikkan standar kehidupan yang ada di Indonesia, mengingat banyak orang di Indonesia yang masih membutuhkan lapangan kerja. Dengan adanya lapangan kerja, para individu tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan kompetisinya, tidak hanya bersaing di level nasional, melainkan di level internasional juga (Syahrir, 2017).

B. DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI TERHADAP UNI EROPA

Sebagai salah satu wilayah yang mengonsumsi dan menggunakan nikel yang diproduksi dan dijual oleh Indonesia, Uni Eropa mengalami berbagai macam kerugian dan dampak yang sangat signifikan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan menerapkan kebijakan hilirisasi nikel adalah sebagai berikut:

a) Konflik Perdagangan Nikel Terhadap Uni Eropa

Pelarangan ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu cara bagi pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan keberadaan nikel yang ada di Indonesia. Di lain sisi, terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, langkah yang dilakukan oleh Indonesia menimbulkan permasalahan perdagangan dengan Uni Eropa, hingga menimbulkan perang dagang. Perang dagang merupakan sebuah konflik yang dialami oleh dua negara atau lebih yang ditandai salah satunya dengan naiknya hambatan tarif maupun non-tarif yang dipersulit secara signifikan yang dapat mempengaruhi lajur perdagangan yang ada (S. W. Rahayu & Sugianto, 2020). Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah berseteru mengenai permasalahan sawit yang mana ekspor sawit dilarang oleh Uni Eropa, yang kemudian dibalas oleh Indonesia dengan cara melarang ekspor nikel.

Menurut Uni Eropa, kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah kerugian terbesar yang dialami oleh Uni Eropa, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang sangat bergantung kepada persediaan nikel, terutama dari Indonesia. Selain daripada itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, bahkan dalam kurun waktu 5 tahun, penjualan nikel Indonesia meningkat tajam sekitar 60% dari total yang semula. Hal ini merupakan sebuah berita yang baik bagi Indonesia, namun peningkatan penjualan tidak disertakan dengan peningkatan mutu penjualan yang harus dicapai oleh pemerintah Indonesia, yang mana melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia ingin menaikkan penjualan dan keuntungan untuk kepentingan nasionalnya (S. W. D. Rahayu, 2020).

Kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia menghambat kinerja industri yang ada di Uni Eropa. Menurut data yang ada, sekitar 30 juta orang yang berada di Uni Eropa bekerja di berbagai macam sektor industri yang menggunakan nikel sebagai bahan baku produksi dari berbagai macam produk yang digunakan dan dikonsumsi di Uni Eropa (Ro & Hanifah, 2017). Tanpa adanya nikel, produksi yang dilakukan oleh industri Uni Eropa akan mengalami hambatan yang sangat signifikan. Akan terdapat sebuah limitasi atau pembatasan yang ketat terhadap angka dari produk yang dijual. Hal itu juga akan mempengaruhi permintaan yang ada di pasar.

Untuk memecahkan permasalahan yang ada, Uni Eropa sebagai salah satu anggota dari WTO kemudian menuduh dan menuntut Indonesia telah mengkhianati dan mengingkari komitmen yang seharusnya dilakukan oleh setiap anggota dari WTO, yang mana Indonesia juga merupakan salah satu dari anggota WTO yang wajib melaksanakan komitmen dari WTO untuk membuka pasar seluas-luasnya yang mana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia yaitu hilirisasi nikel, dianggap melanggar komitmen perdagangan bebas dan telah menyebabkan berbagai macam kerugian di pihak Uni Eropa, yang sangat bergantung kepada nikel yang diekspor oleh Indonesia (Idris, 2021).

Indonesia kemudian membantah dan mengatakan bahwa penjualan yang ada tidak akan selamanya dihentikan, namun akan kembali dijual apabila proses hilirisasi telah selesai. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sumber daya nikel dan persediaan nikel di berbagai macam wilayah Indonesia yang akan habis dalam waktu yang singkat apabila tidak dilakukan manajemen yang tepat. Dengan adanya hilirisasi tersebut, pemerintah Indonesia menekankan bahwa manajemen sangat krusial untuk mengatur ketersediaan sumber daya nikel yang ada di Indonesia.

Terlepas dari apapun, kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh Indonesia di lain sisi menguntungkan Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor terhadap salah satu sumber daya alam yang dimilikinya: nikel, namun di lain sisi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia membuat Uni Eropa mengalami berbagai macam kerugian yang sangat signifikan, mengingat Uni Eropa merupakan salah satu wilayah yang paling terindustrialisasi dan banyak dari sektor industri Uni Eropa yang menggunakan berbagai macam sumber daya alam untuk menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan pada masa sekarang.

b) KENAIKAN HARGA NIKEL

Kenaikan harga nikel menjadi salah satu imbas yang harus dirasakan oleh Uni Eropa sebagai salah satu negara yang menjadi konsumen nikel Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia tidak lagi menjual nikel mentah yang memiliki harga yang lebih murah, melainkan Indonesia menjual nikel yang setengah jadi sesuai dengan kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti yang sebelumnya dijelaskan. Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan penghasilan dan pemasukan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.



Gambar.2 Nikel

Selain dari pada itu, Indonesia memiliki sekitar 52% cadangan nikel yang berada di seluruh dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar penghasil nikel. Pada masa sekarang jenis nikel yang bernama pig iron dan ferro nickel sedang mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menambah pemasukan negaranya dengan menerapkan bea cukai yang disesuaikan dengan kenaikan harga yang dialami (Hanif, 2021).

a. Terdisrupsi Industri Uni-Eropa

Uni Eropa memiliki berbagai macam industri yang sangat bergantung kepada persediaan nikel yang didapat dari berbagai negara yang ada di dunia melalui perdagangan internasional. Uni Eropa juga dikenal sebagai wilayah dan organisasi supranasional yang menghasilkan berbagai macam kendaraan dan berbagai macam alat elektronik lainnya yang dibutuhkan pada masa kini. Sehingga apabila industri tidak mendapatkan stok nikel dengan segera, maka akan berdampak pada permintaan dan persediaan yang ada di pasar dan berpotensi mematikan industri yang ada di Uni Eropa, yang tidak hanya merugikan Uni Eropa, melainkan berbagai macam pelaku industri yang memiliki penghidupan di bidang tersebut.

Kedudukan nikel di industri Uni Eropa berfungsi sebagai baja yang tahan karat. Dengan adanya nikel yang dicampurkan ke berbagai produk yang menggunakan besi atau metal, maka besi yang dipergunakan dan dicampur dengan nikel, kemampuan korosinya akan meningkat secara signifikan. Tanpa nikel, produk yang dihasilkan akan mengalami kerusakan yang sangat cepat, yang akan berdampak terhadap ketahanan dan kualitas produk yang dihasilkan dan akan dikonsumsi oleh para konsumen yang ada di Uni Eropa (S. Dkk, 2019).

Selain daripada itu, di saat pemerintah Indonesia memberitahukan secara resmi bahwa akan terdapat kebijakan penghentian nikel secara sementara, harga nikel mengalami kenaikan dengan drastis dari yang semulanya US\$ 11,575 menjadi US\$ 18.620, meningkat sebesar 61%. Hal ini tentu sangat merugikan bukan hanya kepada Uni Eropa, melainkan kepada negara-negara yang berasal dari seluruh penjuru dunia yang mengonsumsi nikel Indonesia dan menggunakannya di berbagai macam industri yang ada di negaranya (Asmara.Chandra, 2021).

Kenaikan harga nikel dan kemudian pelarangan ekspor nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, secara langsung diprotes oleh Uni Eropa. Protes yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan keadaan perindustrian yang ada di Uni Eropa yang pada saat ini mengalami berbagai macam hambatan yang mengancam keberlangsungan dari kehidupan yang ada di industri tersebut. Protes yang dilakukan oleh Uni Eropa berusaha untuk menghentikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan agar Indonesia kembali menjual nikel ke Uni Eropa seperti yang biasa dilakukan oleh negara tersebut.

5. KESIMPULAN

Hilirisasi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan status ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan posisi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Terlepas dari niat baik yang ingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkat dirinya, kebijakan yang dilakukan menimbulkan banyak kerugian yang cukup signifikan bagi Uni Eropa, yang merupakan kawasan yang memiliki berbagai macam kawasan industri yang sangat memerlukan nikel sebagai salah satu bahan pokok yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Uni Eropa mengalami kerugian akibat nikel tidak lagi dijual oleh Indonesia selama melakukan proses hilirisasi untuk meningkatkan kualitas nikel yang dijual oleh Indonesia di pasar internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya dan mendedikasikan jasanya terhadap peneliti sehingga berhasil melahirkan karya ini.

REFERENSI

- [1] Asmara.Chandra. (2021). *Eropa Gugat RI Soal Larang Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Lawan!* [Www.Cnbcindonesia.Com](http://www.Cnbcindonesia.Com).
- [2] Dkk, K. F. (2017). *Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel di Indonesia*. Jakarta.
- [3] Dkk, S. (2019). ANALISIS DAYA SAING SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR BIJIH NIKEL DI INDONESIA. *E-Jurnal EP Unud*,8[4]:877-906.
- [4] Hanif, I. D. (2021). GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA TAHUN 2019. *JOM FISIP*, 8(3), 95–98.
- [5] Holsti. (1983). *International Politics*. Pretince-Hall.
- [6] Idris, M. (2021). *Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa*. Money.Kompas.Com.
- [7] Immanuel, P., & Wahyudi. (2016). *Sejarah Uni Eropa: Mendedah Masa Lalu dan Isu Terkini* (First edit). Azka Presindo.
- [8] Indonesia, K. P. R. (2018). *Hilirisasi Industri Mutlak*. Kemenperin.Go.Id.
- [9] Investasi, B. K. (2019). *Pemerintah Genjot Investasi untuk Memperkuat Hilirisasi Industri*. [Www.Bkpm.Go.Id](http://www.Bkpm.Go.Id).
- [10] Izzaty, & Suhartono. (2019). Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel. *Info Singkat*, 11(23), 19–24. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf)
- [11] Jackson. Robert, & Sorensen. George. (2013). *Intro to IR: Theories and Approach* (Fifth edit). Oxford University Press.
- [12] Morgenthau, H., & Thomas, K. (1990). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace* (sixth edit).

Alfred A Knopf Inc.

- [13] Putra, I. R. (2021). *Awal Mula Larangan Ekspor Nikel Indonesia Hingga Digugat Uni Eropa ke WTO*. Wwww.Merdeka.Com/. <https://www.merdeka.com/uang/awal-mula-larangan-ekspor-nikel-indonesia-hingga-digugat-uni-eropa-ke-wto.html>
- [14] Rahayu, S. W. D. (2020). IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- [15] Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–236. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>
- [16] Ro, U., & Hanifah, M. (2017). *Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015*. 3(2), 169–195.
- [17] Samvero, J. V. (2022). *Isu Pembatasan Perdagangan Nikel*. Blclawugm.Com.
- [18] Syahrir, I. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pemerintah Negara. *Kajian Ekonomi Keuangan*.